

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BONTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2021

I. Pendahuluan

Sebagaimana halnya Kebijakan Umum APBD (KU APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 18 ayat (1), Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasal 71 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian dari formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operation planning) yang memuat gambaran Rencana Pendapatan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disusun serealistis mungkin dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2019, maupun tantangan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2020.

Penyusunan PPAS berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bontang TA 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang TA 2021, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2016-2021.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya KUA dan PPAS dibahas bersama oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD.

PPAS disusun dengan tujuan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan penganggaran satu tahun yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Bontang dengan DPRD Kota Bontang untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Bontang TA 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2021.

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bontang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

- i. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

II. Rencana Penerimaan Daerah

Indikasi anggaran pendapatan merupakan gambaran awal ketersediaan anggaran pendapatan daerah, yang sangat penting artinya dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Selaras dengan arah kebijakan anggaran pendapatan daerah (KU-APBD TA 2021) dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan mencapai Rp.1.321.615.826.000,00. Berdasarkan rencana penerimaan pendapatan tersebut, PAD diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp.195.066.688.000,00 atau 14,76%, Pendapatan Transfer diperkirakan kontribusi sebesar Rp.1.125.049.158.000,00 atau 85,13% dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah memberi kontribusi sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau 0,11% dari total target penerimaan pendapatan.

Prakiraan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan sumber utamanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	2021 (Proyeksi)
		Pendapatan
1	2	3
1.	Pendapatan Daerah:	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah:	195.066.688.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	99.335.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	4.260.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.531.668.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	87.940.000.000,00
1,2	Pendapatan Transfer:	1.125.049.158.000,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	935.535.851.000,00
1.2.2	Transfer Antar- Daerah:	189.513.307.000,00

NO	URAIAN	2021 (Proyeksi)
		Pendapatan
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	189.513.307.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-
1,3	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	1.500.000.000,00
1,3.1	Hibah	-
1,3.2	Dana Darurat	
1,3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3+1.4)		1.321.615.826.000,00
3.	Penerimaan Pembiayaan	65.000.000.000,00
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	65.000.000.000,00
3.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		65.000.000.000,00
Total Penerimaan		1.386.615.826.000,00

III. Prioritas Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai suatu tatanan terhadap pengeluaran kas daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran diarahkan untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kota Bontang Tahun 2021 diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan prioritasnya Belanja Daerah Tahun 2021 secara umum dialokasikan untuk Kebijakan yang mencakup:

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat:
 - Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang, dan jasa.
 - Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan

pendanaan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat sebagai berikut:
 - Bukan merupakan kegiatan normal atau aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kedaruratan
3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut:
 - Program dan kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat
4. Belanja daerah yang dialokasikan untuk memenuhi 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (SPM), 20 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
5. Belanja dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah.
6. Belanja dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja, di antaranya untuk target *universal coverage* Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
7. Belanja dalam rangka mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
8. Belanja program untuk menciptakan stabilitas ketentraman dan keamanan agar terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Sejalan dengan kebijakan prioritas belanja tersebut, dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kota Bontang tahun 2021, prioritas belanja daerah dialokasikan berdasarkan target dan sasaran pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka

menengah daerah Kota Bontang 2016-2021. Oleh karena itu Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Program Prioritas Sementara tahun 2021 pada prinsipnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2016-2021 yakni: **“Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut, arah dan kebijakan pembangunan akan diejawantahkan melalui tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim,

Berdasarkan ketiga misi pembangunan tersebut dapat dimaknai bahwa prioritas pembangunan periode 2016-2021 menekankan pada penguatan daya saing SDM, perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor non migas, khususnya sektor ekonomi maritim untuk secara gradual mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Oleh karena itu telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang harus dicapai pada setiap tahun perencanaan dan untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2021 tujuan dan sasaran pembangunannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Satuan
	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua	IPM	81	Persentase
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	10,45	Tahun
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	13	Tahun
			Nilai rata-rata ujian akhir SD	221,16	Jumlah nilai
		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua	Nilai rata-rata ujian akhir SLTP	275	Jumlah nilai
			Angka harapan hidup	73,96	Persentase
			Angka Kematian Bayi	7	Persentase
			Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	50	Rasio

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Satuan
1. Menjadikan Kota Bontang Sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Mengembang-kan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	3. Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama	Prevalensi Balita Gizi kurang	<5%	Persentase
			Tingkat Kemiskinan (%)	4	Persentase
			Tingkat Pengangguran (%)	8,3	Persentase
			Indeks Gini	0,32	Persentase
			Jumlah Konflik terkait SARA	0	Jumlah
		Indeks Pembangunan Gender	88,8	Indeks	
		4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB	Nilai
			Nilai LPPD	ST	Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,21	Indeks
			Indeks Reformasi Birokrasi	B	Nilai
			Indeks Persepsi Korupsi	5,9	Indeks
			Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan pembangunan	100%	Persentase
			Nilai Peningkatan e-Government Indonesia (PeGi)	3,0	Poin/skor
		Indeks Kota Cerdas Indonesia	56	Poin/skor	
2. Menjadikan Kota Bontang Sebagai Green City Melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Mengembang-kan pembangunan kota yang ramah lingkungan	1. Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	Cakupan pelayanan air limbah domestik	100	Persentase
			Cakupan Penanganan sampah	85,00	Persentase
		2. Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan	Usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan	100	Persentase
		3. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau	3.110	Luas (ha)
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	kawasan perumahan dan Permukiman kumuh	0	Kawasan
		5. Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	mempertahankan laju pertumbuhan emisi	2.569,0	Ton CO2
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum	6. Meningkatkan akses pelayanan air minum	cakupan pelayanan air minum	100	Persentase	
		7. Terlaksananya konservasi sumber daya air	Kedudukan permukaan air tanah di 2 (dua) sumur pantau	-45,1	Meter
				-59,9	Meter
3. Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	8. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	87,68	Persentase	
		Rehabilitasi ekosistem pesisir	288,28	Luas (ha)	
		Rehabilitasi ekosistem terumbu karang	258,63	Luas (ha)	
		9. terselesaikannya permasalahan banjir	Luas wilayah tergenang	13,91	Luas (ha)
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim	1. Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	Pertumbuhan PDRB Non Migas	8-10	Persentase
		11. Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	Kontribusi sektor ekonomi maritim terhadap PDRB non migas	10-15	Persentase
		12. Meningkatnya Perdagangan dan industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas	89,95	Persentase

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Satuan
			Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB non migas	8,87	Persentase
	2. Peningkatan daya daing ekonomi Kota Bontang	13. Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota	Panjang jalan kondisi baik	91,45	Persentase
			Jumlah sarana perdagangan/pasar	4	Unit
			Sarana dan Prasarana Pelabuhan	5	Unit
			Pembangunan Bandara	1	Unit
			Jaringan gas rumah tangga	15	Kelurahan
			Pengelolaan Kawasan Industri baru	100	Persentase

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 mengacu pada tahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021. Mengacu pada visi rencana jangka panjang dan jangka menengah periode 2016-2021, pembangunan tahun 2019 menetapkan tema "Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui Pengembangan Industri dan Pariwisata".

Penetapan tema ini merupakan wujud konkrit dari upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk memantapkan struktur perekonomian daerah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka penjabaran RKP tahun 2021 yang menetapkan tema pembangunan "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Fokus penguatan pertumbuhan ekonomi diimplementasikan melalui stimulasi dan pengembangan sektor industri dan kebijakan pembangunan khususnya pengembangan sektor pariwisata pesisir yang diarahkan menjadi stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi masyarakat yang cukup terdampak oleh penyebaran *Pendemi Covid-19* pada tahun 2020.

Sejalan dengan maksud tersebut, prioritas pembangunan yang terkait dengan peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur ekonomi, dan kebijakan pembangunan dalam rangka penciptaan iklim investasi tetap masih akan menjadi fokus pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021. Demikian pula prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial tetap menjadi sasaran pembangunan yang juga harus dicapai pada tahun 2021.

Hasil analisis terhadap rumusan permasalahan, isu-isu strategis pembangunan, dan lainnya, serta secara paralel memperhatikan pula prioritas pembangunan nasional

dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam penentuan prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2021. Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, pada tahun 2021 dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua
3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
4. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
7. Peningkatan akses pelayanan air minum
8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas
9. Peningkatkan daya saing ekonomi
10. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah

Penetapan prioritas pembangunan ini akan menjadi *"main stream"* dalam menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Sejalan dengan penetapan prioritas pembangunan tahun 2021, belanja pembangunan ditetapkan berdasarkan program-program prioritas yang akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan. Implementasi dari program-program prioritas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2021. Relevansi antara pencapaian sasaran, prioritas pembangunan dan program prioritas tahun 2021 disajikan dalam matrik berikut:

Tabel 3.2 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
1	Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan APK PAUD sebesar 95.01 %	95,60%	Disdik
				Meningkatnya Kompetensi GTK	100,00%	Disdik
		Program Pengembangan Kurikulum	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD	110,00%	Disdik
					98,85%	Disdik
				Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP	109,40%	Disdik
					80,59%	Disdik
		Program Pendidikan Non Formal	Terakreditasinya LKP (46 LKP)	100	Disdik	
				Terakreditasinya PKBM (29 PKBM)	37,93	Disdik
				Terbentuknya TBM disetiap kelurahan (15 kelurahan)	100	Disdik
				Jumlah tuna aksara (323 orang)	15,48	Disdik
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip MBS	90%	Disdik	
				Persentase siswa yang mendapatkan fasilitas seragam dan perlengkapan belajar	100%	Disdik
		Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah penerima bantuan dana BOSTK	100%	Disdik	
				Persentase guru layak mengajar - S1 (<i>jumlah guru belum berkualifikasi S1 193 orang dari 1.466 orang</i>)	100%	Disdik
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 (SD-SMP)	40	Disdik
				Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S3 (SD-SMP)	3	Disdik
				Pemenuhan sarana penunjang KBM (satu guru satu laptop)	75%	Disdik
Guru swasta mendapat insentif daerah	100%			Disdik		
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	222.264			DPK		

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
			Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan daerah	234.499	DPK
			Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpusatakaan	Publikasi Pemasarakatan Minat Baca	95%	DPK
				Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Pameran Buku KPAD	100%	
2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	Dinkes
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Kurus/ <i>Wasting</i> (BB/TB)	< 5	Dinkes
				Prevalensi Gizi Kurang/ <i>Underweight</i> (BB/U)	< 5	
				Prevalensi Baduta pendek/ <i>Stunting</i> (TB/U)	< 20	
			Program peningkatan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	6	Dinkes
				Angka Kematian Ibu (AKI)	50	
				Angka Kematian Bayi (AKB)	3,1	
			Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesembuhan TB	90	Dinkes
				Prevalensi HIV	<1	
				IR DBD	50	
Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kejiwaan	Prevalensi Hipertensi	22	Dinkes			
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%	Dinkes			
	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	1:15000				

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
				Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	0	
			Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan BPJS	100%	
			Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%	Dinkes
				Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	1:15000	
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinkes
			Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	Terbangunnya SIKda Terpadu	100	Dinkes
			Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana	KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	Dinkes
				UCI Kelurahan	100	
			Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi	1	Dinkes
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan pelayanan kesehatan	1	Dinkes,
				Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit	90%	RSUD
			Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan	100%	RSUD
			Program pengembangan manajemen pelayanan rumah sakit	Akreditasi RS meningkat sesuai kelasnya	Tipe B	RSUD
			Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD	Skor Survey Kepuasan Masyarakat		

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah		
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	30%	Dinkes RSUD		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Pengawasan Obat dan makanan	TPM yang memenuhi syarat (memiliki sertifikat)	56	Dinkes		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga ber-PHBS	90%	Dinkes		
				Meningkatnya media promosi kesehatan RS	100%	RSUD		
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana kesehatan berizin	100%	Dinkes		
				persentase Puskesmas dan klinik pegawai melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung sesuai standar	100%			
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kelurahan melaksanakan STBM	100%	Dinkes		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Program Keluarga Berencana	Pengendalian angka kelahiran	90%	DPPKB	
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	85%	DPPKB	
				Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB	68%	DPPKB	
				Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	strata kelompok bina keluarga balita	3 tk dasar, 15 tk berkembang, 2 6tk paripurna	DPPKB	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU	45	DPPKB		
		3	Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS.	100%	DSPM
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Optimalnya peran Lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial	60%	DSPM

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
		Program Rehabilitasi Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	98%	DSPM
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	98%	DSPM
			Program Pembinaan Panti Asuhan Dan Panti Jompo	Terbinanya panti asuhan dan jompo	98%	DSPM
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penganggiran terbuka	6740	Disnaker
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih	200	Disnaker
		Program Hubungan Industrial	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	perselisihan hubungan industrial (PHI) yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan /perjanjian bersama (PB)	90%	Disnaker
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100%	DPPKB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100%	DPPKB
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak				
		Program Perlindungan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Menurunkan angka KDRT dan anak	100%	DPPKB
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender	25	DPPKB
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang memiliki kelompok binaan	90%	DSPM
			Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat.	90%	DSPM
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan	Persentase keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat dalam	96%	DSPM

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
				musrembang (berbasis profesi, geografi, gender, dan lainnya)		
			Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Yang Berhasil	2	DSPM
			Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah RTS-PM yang mendapatkan pembinaan (orang)	60	DSPM
			Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin	Jumlah RTM yang terampil (orang)	60	DSPM
4	Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Pelayanan Sarana Peribadatan	Cakupan layanan dan pembinaan kegiatan keagamaan	100%	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	70%	Disdik
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya	80%	Disdik
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah usaha kegiatan yang dibina	30	DLH
				persentase penanganan kasus lingkungan	100%	DLH
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah sumur resapan	25 sumur	DLH
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan informasi lingkungan hidup	100%	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	22,5%	DPKP2
				cakupan median jalan yang dipelihara dengan baik	100%	DPKP2
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang terpenuhi	3.110	DPKP2

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	Menurunnya sampah yang diangkut ke TPA	75,0%	DLH
				Meningkatnya sampah yang diolah	25,0%	DLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	75	DPUPR
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Program Penataan Permukiman Lingkungan	Jumlah RUSUNAMI dan RUSUNAWA yang terbangun	5 Unit (6 blok)	DPKP2
				Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai	350 rumah	DPKP2
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Program penataan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh (M2)		DPKP2
			Program Pengembangan Perumahan	Jumlah titik kawasan kumuh	0 titik/lokasi	DPKP2
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	619 unit	DPKP2
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Terciptanya lingkungan permukiman yang layak	750 M
			Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Kecamatan
7	Peningkatan akses pelayanan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tingkat pemenuhan sumber air baku		DPUPR
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah	Meningkatnya persentase rumah tinggal bersanitasi dan meningkatnya suplai air minum	5 UNIT, 150 SR	DPUPR
8	Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	100%	DKP3
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola pangan Harapan	96	DKP3
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Keamanan Pangan	% Sample Pangan Segar Aman yang diUji	80%	DKP3

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap	produksi hasil tangkapan	19.186,8 ton	DKP3
			Program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase jumlah petugas perikanan yang memiliki kompetensi terkait perikanan tangkap	100%	DKP3
				jumlah kelompok nelayan yang mengalami peningkatan kemandirian	50 kelompok	DKP3
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	bertambahnya kelurahan yang menjadi sentra pengolahan hasil perikanan	1	DKP3
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Rumput Laut	1.733,79 ton	DKP3
				Jumlah Produksi Ikan (ton)	17,485	DKP3
			Peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya keterampilan petani	270	DKP3
				Meningkatnya kelas kelompok tani	18 kelompok kelas lanjut	DKP3
				Meningkatnya produktifitas lahan	3,5 Ha	DKP3
					Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan	mengikuti pameran dalam dan luar daerah
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			Meningkatnya Kelompok tani penerima bantuan	5 kelompok	DKP3
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kelompok tani penerima bantuan	39 kelompok
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			Terselenggaranya peningkatan swasembada daging	100%	DKP3
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pasar Hasil Produksi Peternakan	100%	DKP3
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Peningkatan koperasi yang aktif (target akhir 88,00% Koperasi aktif)	8,00	DKUKMP

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah	
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021				
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	bertambahnya volume usaha pelaku mikro (Milyar)	7968,78	DKUKMP	
		Program Pengembangan Umkm	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat penguatan modal (pelaku)	606	DKUKMP	
			Program Penciptaan Iklim usaha UKM yang kondusif	jumlah izin usaha mikro kecil yang diterbitkan	1500	DKUKMP	
			Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah	1240	DKUKMP	
9	Peningkatkan daya saing ekonomi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Lama Proses Perizinan Perdagangan (HO, SIUP, TDP) (Hari)	3		
			Program peningkatan pelayanan perizinan	Peningkatan PAD dari retribusi perizinan 5% per tahun			
10	Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	91,15%	DPUPR	
			Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan				
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan				
			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	3 Unit, 12 Paket	DPUPR	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah	Terbangunnya gedung/bangunan yang representatif	1 UNIT	DPUPR	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran	1.465 Meter	DPUPR	
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap sungai	216 Meter	DPUPR
		Panjang turap jalan		20 Meter	DPUPR		

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
		Program Pengelolaan Pelayaran	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut	100%	DISHUB
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)		Cakupan ketersediaan fasilitas perhubungan darat	85%	DISHUB

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun pemerintah provinsi. Dalam RKP tahun 2021 menetapkan tema pembangunan “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Keselarasan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 antara prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas pembangunan RKP dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sinergitas Program Kota Bontang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas wilayah tergenang banjir : 924.2 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat : 100 %	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan : 100 %	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan : 100 %	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tersedianya data statistik perikanan : 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan kapasitas sumber daya : 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Objek Daya Tarik Wisata / (ODTW) yang representatif : 50%	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentasi Peningkatan Kunjungan Wisata : 20%	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Peningkatan Sumberdaya Pariwisata Dan Pelaku Ekonomi Kreatif : 40%	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemanfaatan sarana pendukung pertanian : 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya sarana prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) : 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan Kesehatan : 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	tingkat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan : 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tingkat Pelayanan Penyuluhan pertanian : 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya kemampuan Pelaku industri : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	tersedianya database industri : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan			
2	MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi sekolah : 85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase lembaga PAUD dan Lembaga Pendidikan Nonformal yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal : 85 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	Dinas Pendidikan dan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan : 85 %	Kebudayaan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Angka Harapan Hidup, AKI dan AKB : 100%	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN : 100%	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan : 100%	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah tangga ber-PHBS : 100%	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas wilayah tergenang banjir : 924.2 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN	Cakupan layanan terhadap penyediaan air bersih : 91.45 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses air limbah domestik yang layak : 99.5 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas wilayah tergenang banjir : 924.2 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Permukiman : 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan berIMB : 52,01%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Konektifitas Jalan : 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase Pengembangan Jasa Konstruksi yang Terstruktur, Profesional dan Akuntabel : 77%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang : 46,87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum : 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	presentase kelompok masyarakat yang memperoleh layanan kebencanaan : 3 kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Tingkat Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran : 100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS. : 100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK	Cakupan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang terlayani : 100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial : 60%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	

		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial : 98%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial :	Dinas Sosial dan	
				Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara : 100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup : 80%	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Tingkat kepatuhan pengelolaan limbah B3 : 100%	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Persentase pemenuhan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH : 3%	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Tingkat pemahaman SDM lingkungan hidup : 71%	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP LINTIK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup : 67%	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat : 100%	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan : 98%	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pelayanan izin usaha simpan pinjam dan penerbitan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan dan pemeriksaan koperasi : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan koperasi yang aktif : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya kuantitas, sarana pemasaran, permodalan dan SDM UKM : 95%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Pembinaan dan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan :	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks profesional dimensi kompetensi : 28%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan : 77%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
3	MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi sekolah : 85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase lembaga PAUD dan Lembaga Pendidikan Nonformal yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal : 85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan : 85 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Angka Harapan Hidup, AKI dan AKB : 100%	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN : 100%	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan : 100%	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah tangga ber-PHBS : 100%	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum : 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	presentase kelompok masyarakat yang memperoleh layanan kebencanaan : 3 kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Tingkat Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran : 100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS. : 100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK	Cakupan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang terlayani : 100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial : 60%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial : 98%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial : 100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara : 100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Di Latih : 100%	Dinas Ketenagakerjaan	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja lokal yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan : 24%	Dinas Ketenagakerjaan	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial : 100%	Dinas Ketenagakerjaan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan : 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Pemberdayaan Keluarga : 75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya data statistik Gender dan anak : 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian predikat Kota Layak Anak : Nindya (710)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tercapainya kluster perlindungan khusus anak kab/Kota Layak Anak : Nindya (710)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase cakupan pelayanan pendaftaran penduduk :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil : 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	peningkatan pengelolaan profil kependudukan :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rasio Akseptor KB per 100 Orang : 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana : 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kesejahteraan keluarga : 1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pelayanan izin usaha simpan pinjam dan penerbitan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan dan pemeriksaan koperasi : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan koperasi yang aktif : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya kuantitas, sarana pemasaran, permodalan dan SDM UKM : 95%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Pemenuhan Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal : 100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Investasi dan Promosi Potensi Daerah : 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pemenuhan Layanan Sesuai Standar Perizinan dan Non Perizinan : 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ketaatan Perusahaan terhadap aturan Penanaman Modal : 10 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan : 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase Pemuda Yang Berprestasi : 75%	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Organisasi Kepramukaan : 80%	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Prosentase Sarana Distribusi Perdagangan : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	STABILISAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	

		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi Pameran Dagang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,	
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPDPelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Komoditi Ekspor Yang Semakin Luas : 100%	Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Tersedianya sistem dan jaringan informasi yang akurat : 1 Paket bangunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya kemampuan Pelaku industri : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	tersedianya database industri : 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Pembinaan dan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan :	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keberhasilan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : 100%	Kecamatan Bontang Utara; Kecamatan Bontang Selatan; Kecamatan Bontang Barat	
4	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi sekolah : 85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase lembaga PAUD dan Lembaga Pendidikan Nonformal yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal : 85 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan : 85 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase cakupan pelayanan pendaftaran penduduk :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil : 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	peningkatan pengelolaan profil kependudukan :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase Pengembangan Kebudayaan : 70 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyusunan dan Pengoordinasian Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat : 80%	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesional dimensi kualifikasi : 18%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme : 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Prosentase pembinaan politik : 77,74%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Tingkat partisipasi ormas di Kota Bontang : 13,17%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

5	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas wilayah tergenang banjir : 924.2 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN	Cakupan layanan terhadap penyediaan air bersih : 91.45 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses air limbah domestik yang layak : 99.5 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas wilayah tergenang banjir : 924.2 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Permukiman : 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan berIMB : 52,01%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Konektifitas Jalan : 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase Pengembangan Jasa Konstruksi yang Terstruktur, Profesional dan Akuntabel : 77%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang : 46,87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat ketertiban dan keselamatan pengguna jalan : 100%	Dinas Perhubungan			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dokumen kajian transportasi antar pulau : 100%	Dinas Perhubungan			
		6	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum : 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	presentase kelompok masyarakat yang memperoleh layanan kebencanaan : 3 kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Tingkat Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran : 100%			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup : 80%			Dinas Lingkungan Hidup			
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup : 67%			Dinas Lingkungan Hidup			
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat : 100%			Dinas Lingkungan Hidup			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan : 98%			Dinas Lingkungan Hidup			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
7	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum : 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	presentase kelompok masyarakat yang memperoleh layanan kebencanaan : 3 kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Tingkat Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran : 100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah : 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain Dikelola : 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyusunan dan Pengoordinasian Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat : 80%	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya Pelayanan dan administrasi keuangan : 100%	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Pemenuhan Fasilitas dukungan pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD : 100%	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesional dimensi kualifikasi : 18%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme : 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Prosentase pembinaan politik : 77,74%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Tingkat partisipasi ormas di Kota Bontang : 13,17%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Menelaah arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim, Kota Bontang sebagai bagian integral dari wilayah regional Kaltim harus mampu menyusun arah kebijakan pembangunan yang dapat menjamin terwujudnya sinergitas antara sasaran pembangunan kedua entitas wilayah dan pemerintahan tersebut. Untuk itu dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahun 2021, upaya untuk meningkatkan keselarasan dilaksanakan dengan merumuskan prioritas pembangunan dengan memperhatikan arahan kebijakan pembangunan provinsi Kaltim Tahun 2021.

Tabel 3.4
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi sekolah : 85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.428.907.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase lembaga PAUD dan Lembaga Pendidikan Nonformal yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal : 85 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	189.900.000,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keletteran : 85 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN : 100%	Dinas Kesehatan	418.950.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN : 100%	Rumah Sakit Umum Daerah	694.000.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Di Latih : 100%	Dinas Ketenagakerjaan	450.000.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja lokal yang mendapat fasilitas penempatan dan	Dinas Ketenagakerjaan	461.200.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial : 100%	Dinas Ketenagakerjaan	295.000.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesional dimensi kualifikasi : 18%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.696.140.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks profesional dimensi kompetensi : 28%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.333.090.500,00
2	PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas wilayah tergenang banjir : 924.2 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	46.029.603.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Cakupan layanan terhadap penyediaan air bersih : 91.45 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	21.000.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses air limbah domestik yang layak : 99.5 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	18.458.615.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas wilayah tergenang banjir : 924.2 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	40.970.000.000,00

		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Permukiman : 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	0,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan berIMB : 52,01%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	51.550.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Konektifitas Jalan : 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	45.792.788.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase Pengembangan Jasa Konstruksi yang Terstruktur, Profesional dan Akuntabel :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	616.742.980,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang : 46,87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.534.048.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.751.477.000,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.752.010.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	39.874.157.522,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat ketertiban dan keselamatan pengguna jalan : 100%	Dinas Perhubungan	12.599.235.237,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dokumen kajian transportasi antar pulau : 100%	Dinas Perhubungan	121.602.000,00
3	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang : 46,87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.534.048.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup : 80%	Dinas Lingkungan Hidup	429.780.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Mutu Air : Memenuhi	Dinas Lingkungan Hidup	900.719.654,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik : 100%	Dinas Lingkungan Hidup	66.975.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik : 100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.163.819.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Tingkat kepatuhan pengelolaan limbah B3 : 100%	Dinas Lingkungan Hidup	6.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Persentase pemenuhan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH : 3%	Dinas Lingkungan Hidup	21.950.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Tingkat pemahaman SDM lingkungan hidup : 71%	Dinas Lingkungan Hidup	129.145.000,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase penghargaan lingkungan hidup : 67%	Dinas Lingkungan Hidup	133.674.000,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat : 100%	Dinas Lingkungan Hidup	41.225.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan : 98%	Dinas Lingkungan Hidup	10.041.640.831,00

4	OPTIMALISASISUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH, PENATAAN PERIZINAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Pemenuhan Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal : 100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	267.177.500,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Investasi dan Promosi Potensi Daerah : 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	412.345.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pemenuhan Layanan Sesuai Standar Perizinan dan Non Perizinan : 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	182.640.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ketaatan Perusahaan terhadap aturan Penanaman Modal : 10 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	157.720.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan : 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	454.470.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya penerimaan Pendapatan daerah : 5%	Badan Pendapatan Daerah	2.575.337.500,00
5	PENINGKATAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase cakupan pelayanan pendaftaran penduduk :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.000.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil : 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	peningkatan pengelolaan profil kependudukan :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM : 84 poin	Kecamatan Bontang Barat	472.172.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM : 84 poin	Kecamatan Bontang Selatan	90.700.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM : 84 poin	Kecamatan Bontang Utara	89.282.500,00
				JUMLAH	404.418.788.224,00

Prioritas pembangunan tahun 2021 yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2021 yang merupakan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk tahun 2020, selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Urusan tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dijabarkan berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun program prioritas, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja pada Tabel 3.5 sebagaimana *terlampir*.

IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan

Kebijakan Belanja dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Bontang tahun 2021 secara garis besar akan melaksanakan sejumlah 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, 5 (lima) Urusan Pilihan, 2 (dua) unsur pendukung, 7 (tujuh) unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan Umum yakni kesatuan bangsa dan politik.

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang telah ditetapkan selanjutnya Perangkat Daerah menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan Plafon Sementara Anggaran masing-masing Urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan alokasi sebagaimana termuat dalam lampiran dokumen ini. (**Tabel 4.1 Terlampir**).

Plafon Anggaran Sementara untuk seluruh Belanja Daerah yang terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 1.386.615.826.000,00 tidak termasuk belanja pembangunan yang bersumber dari DAK, dana BOS, dan Bantuan Keuangan Provinsi, yang akan digunakan untuk menganggarkan belanja pembangunan dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	2021 (Proyeksi)
1	2	6
1	Belanja Pegawai	583.272.332.835,00
2	Belanja Barang dan Jasa	502.988.604.255,00
3	Belanja Bunga	-
4	Belanja Subsidi	-
5	Belanja Hibah	15.000.000.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00
7	Belanja Modal	275.734.888.910,00
	a. Belanja Modal Tanah	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
	c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	-
	d. Belanja Modal Jalan	-
	e. Belanja Modal Irigasi dan Jaringan	-
	f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
9	Belanja Bagi Hasil	-
10	Belanja Bantuan Keuangan	6.120.000.000,00
TOTAL BELANJA		1.386.615.826.000,00

V. Rencana Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk Tahun 2021 Kota Bontang menargetkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.65.000.000.000,00 yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) daerah tahun sebelumnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan daerah pada tahun 2021, Pemerintah Kota Bontang belum merencanakan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan daerah. Mengingat belum adanya rencana alokasi untuk Penyertaan Modal Investasi yang telah ditetapkan dengan Perda, maka seluruh penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Jumlah Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Daerah TA. 2021

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	65.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	65.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		65.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00
Pembiayaan Netto		65.000.000.000,00

VI. Penutup

Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai dengan pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pembahasan KUA dan PPAS dapat berlangsung dengan lancar agar KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 dapat disepakati bersama.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) akibat adanya kebijakan pemerintah, maka Program dan kegiatan yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Bontang Tahun 2021 ini dapat dilakukan penyesuaian program dan kegiatan serta penambahan dan pengurangan pagu anggaran indikatifnya. Penyesuaian program dan kegiatan serta penambahan dan pengurangan pagu anggaran indikatif dimaksud akan dilakukan dalam proses pembahasan APBD bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bontang.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2021.